



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

**RENJA
DINAS PARIWISATA KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Pariwisata Kota Makassar ini dapat disusun.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Pariwisata Kota Makassar ini menggambarkan Rencana Kerja Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh masing-masing bidang dalam lingkup Dinas Pariwisata Kota Makassar. Selain itu Rencana Kerja Tahun 2022 ini adalah rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2022 yang berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kota Makassar.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Makassar Tahun 2022 ini dibuat untuk menjadi bahan sesuai ketentuan perundangan.

Makassar, April 2021
Pih. KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA MAKASSAR,

Muhammad Roem, S.STP., M.Si
Pangkat: Pembina
N I P : 19831110 200212 1 001

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	10
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA	27
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA	31
BAB IV	PENUTUP	37
LAMPIRAN :		
Lampiran 1 : Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2020		
Lampiran 2 : Evaluasi Rencana kerja Tahun 2021 Triwulan I		
Lampiran 3 : Rekapitulasi Renja Tahun 2022		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata agar lebih berkualitas, Dinas Pariwisata Kota Makassar selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan daerah dalam Bidang Pariwisata berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Makassar Tahun 2022.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian, RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan pemerintah daerah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan RENJA OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Sebagai dokumen resmi pemerintah daerah, Rencana Kerja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan

penganggaran tahunan. Oleh karena itu, RKPD dan RENJA OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja OPD (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Dalam perencanaan pembangunan di bidang Pariwisata tujuan yang ingin dicapai harus benar-benar direncanakan dengan matang, pengkajian yang akurat dan tolak ukur indikator kinerja yang tepat sehingga menghasilkan output program dan kegiatan yang terukur dan berkualitas.

Dinas Pariwisata Kota Makassar yang menangani Urusan Pemerintahan Pilihan Pariwisata dengan mengacu pada Undang-Undang Kepariwisata Nomor 10 Tahun 2009, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 (Lampiran VI) tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja OPD (Renja OPD), Permendagri 86 Tahun 2017, Permendagri 90 Tahun 2019, dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 kemudian menyusun Rencana Kerja (Renja) di bidang Pariwisata dengan maksud menyediakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja OPD (OPD) yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Rencana Kerja di bidang Pariwisata sebagai Penjabaran Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Makassar merupakan sebuah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang Pariwisata dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah Kota Makassar.

1.2 Landasan Hukum.

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Undang-undang Nomor 10 tentang Kepariwisataaan;
- 5) Undang-undang nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan kabupaten-Kabupaten Gowa, maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan daerah Propinsi sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

- Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - 15) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Normal 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 16) Peraturan Walikota Makassar Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 17) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi OPD (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
 - 18) Peraturan Walikota Makassar Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Event Kepariwisata pada Dinas Parwisata;
 - 19) Peraturan Walikota Makassar Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pantai Losari pada Dinas Pariwisata;
 - 20) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2020);
 - 21) Peraturan Walikota Makassar Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Makassar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 71 Tahun 2020).

1.3. Maksud dan Tujuan

Sebagai Dokumen Perencanaan OPD untuk periode satu tahun, Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, baik itu dalam bentuk kerangka regulasi maupun dalam bentuk kerangka anggaran. Rencana Kerja OPD dimaksudkan sebagai patokan RKA-OPD sehingga setiap kegiatan OPD menjadi jelas dan terarah, serta pencapaian sasaran dapat terukur, baik dari segi sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi serta dana. Dengan terukurnya outcome (hasil) dari kegiatan OPD mencerminkan kinerja suatu OPD.

Penyusunan Rencana Kerja bertujuan :

- a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi di masing-masing bidang dan seksi OPD.
- b. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi di masing-masing bidang dan seksi OPD.
- c. Penyelarasan program dan kegiatan OPD dalam mengoptimalkan pencapaian sasaran sesuai visi dan misi dan Tugas Pokok dan Fungsi OPD.
- d. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas pagu indikatif untuk masing-masing OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kota Makassar disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Pariwisata agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pariwisata, Proses penyusunan Renja, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra, Renja K/L dan Renja

provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pariwisata.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pariwisata, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun 2019) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2020), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara OPD provinsi dengan OPD kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/ kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA

4.1 Program, Kegiatan, dan Pendanaan OPD

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
2. Pencapaian MDGs,
3. Pengentasan kemiskinan,

4. Pencapaian SPM,
 5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 6. Pengembangan daerah terisolir,
 7. Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- Jumlah program dan jumlah kegiatan;
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu);
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD****2.1.1 Evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2020 (Tahun Lalu)**

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Renja Dinas Pariwisata Kota Makassar Tahun 2020 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pariwisata Kota Makassar Tahun 2020 meliputi 2 (dua) hal, pelaksanaan rencana program & kegiatan dan hasil rencana program & kegiatan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Pariwisata sampai dengan tahun 2020 dapat diuraikan pada lampiran 1 (menurut lampiran VI Permendagri 54 Tahun 2010):

Dari lampiran 1, Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan tahun 2020 dapat kita lihat terbagi ke dalam tiga bagian penting yakni;

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Selama tahun 2020, Dinas Pariwisata Kota Makassar telah melaksanakan 6 program dan 35 kegiatan, terdiri dari 2 program pendukung (20 kegiatan) dan 4 program utama (15 kegiatan). Realisasi total (program utama dan pendukung) rata-rata capaian target kinerja 60,20% dengan predikat **Rendah (R)**, sementara total realisasi rata-rata capaian anggaran sebesar 65,36% dengan predikat **Rendah (R)**.

Realisasi capaian target kinerja program utama adalah 46.50% dengan predikat **Sangat Rendah (SR)**, sedangkan realisasi capaian target anggaran program utama sebesar 39.37% dengan predikat **Sangat Rendah (SR)**. Untuk realisasi capaian target kinerja program pendukung adalah

39,25% dengan predikat **Sangat Rendah (SR)**, sedangkan realisasi capaian target anggaran program pendukung sebesar 26,95% dengan predikat **Sangat Rendah (SR)**.

Dari 4 program utama tersebut masih tetap berlanjut ke periode Renja 2022. 4 program utama yang masih berlanjut tersebut adalah : 1) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, 3) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan, 4) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata. Masih berlanjutnya 4 program utama tersebut karena masih sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 setelah hasil pemetaan.

Untuk program penunjang/pendukung ada 1 program yang masih berlanjut ke Renja berikutnya yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2.1.2 Evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2021 (Tahun Berjalan)

Selama tahun 2021, Dinas Pariwisata Kota Makassar melaksanakan 6 program dan 35 kegiatan, terdiri dari 1 program pendukung (6 kegiatan dan 23 sub kegiatan) dan 4 program utama (8 kegiatan dan 19 sub kegiatan). Realisasi total (program utama dan pendukung) rata-rata capaian target kinerja 10,60% dengan predikat **Sangat Rendah (SR)**, sementara total realisasi rata-rata capaian anggaran sebesar 2,02% dengan predikat **Sangat Rendah (SR)**. Adapun secara rinci evaluasi program utama dan pendukung sampai triwulan I tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Program Pendukung

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yakni; a) Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan) dengan Target Kinerja 90%, b) Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik dengan Target Kinerja 90%, c) Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah dengan Target Kinerja 100%, dan 4) Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas dengan Target kinerja 90%. Total anggaran yang mendukung program ini adalah sebesar Rp. 10.270.218.100,-. Adapun capaian kinerja sampai Triwulan I sebesar 25% dengan realisasi anggaran Rp. 1.694.075.404,- atau 16,50%.

Rata –rata Capaian kinerja sampai Triwulan I tahun 2021 yakni sebesar 26,53% dengan kategori Sangat Rendah.

Adapun faktor Pendorong adalah adanya kerja sama yang baik antar pejabat teknis dan pihak ketiga yang berjalan maksimal serta motivasi dari pimpinan dan segenap staf Dinas Pariwisata, sedangkan faktor penghambat adalah adanya pandemi Covid-19 menyebabkan keterbatasan kegiatan dan proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi.

Program Utama

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Indikator kinerja program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yaitu a) PAD Sektor Pariwisata, dengan target kinerja 27,12%, b) Lama Kunjungan Wisata dengan target kinerja 3 hari, dan c) Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang Dikelola Secara Terpadu dengan target kinerja 1 Kawasan. Total anggaran yang mendukung program ini adalah sebesar Rp. 6.242.600.800,-. Adapun capaian kinerja sampai Triwulan I sebesar 0% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 216.200.000,- atau 3,46% . Rata – rata Capaian kinerja sampai Triwulan I tahun 2021 yakni sebesar 25% dengan kategori Sangat Rendah.

Adapun faktor Pendorong adalah adanya kerja sama yang baik antar pejabat teknis dan pihak ketiga yang berjalan maksimal, motivasi dari pimpinan dan segenap staf Dinas Pariwisata, sedangkan faktor penghambat adalah masih lemahnya dukungan sumber daya manusia yang berkompeten, adanya pandemi covid-19 menyebabkan keterbatasan kegiatan /akses dan proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi.

2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Indikator kinerja program Pemasaran Pariwisata yaitu a) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Nusantara dengan target kinerja 1.578.980 wisnus, b) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Mancanegara dengan target kinerja 29.945 wisman, dan c) Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB dengan target kinerja 1,06%. Total anggaran yang mendukung program ini sebesar Rp. 5.852.545.600,-. Adapun capaian kinerja sampai Triwulan I sebesar 0% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-

atau 1,03% . Rata –rata Capaian kinerja sampai Triwulan I tahun 2021 yakni sebesar 1,47% dengan kategori Sangat Rendah.

Adapun faktor Pendorong adalah adanya kerja sama yang baik antar pejabat teknis dan pihak ketiga yang berjalan maksimal, motivasi dari pimpinan dan segenap staf Dinas Pariwisata, sedangkan faktor penghambat adalah masih lemahnya dukungan sumber daya manusia yang berkompeten, adanya pandemi covid-19 menyebabkan keterbatasan kegiatan /akses dan proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi.

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Indikator kinerja program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu a) PAD Sektor Ekonomi Kreatif dengan target kinerja 20%, b) Persentase Kenaikan Nilai Produksi Ekonomi Kreatif dengan target indikator sebesar 25%. Total anggaran yang mendukung program ini sebesar Rp. 7.257.872.000,-. Adapun capaian kinerja sampai Triwulan I sebesar 0% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- atau 0,07% . Rata – rata Capaian kinerja sampai Triwulan I tahun 2021 yakni sebesar 0% dengan kategori sangat rendah.

Adapun faktor Pendorong adalah adanya kerja sama yang baik antar pejabat teknis dan pihak ketiga yang berjalan maksimal, motivasi dari pimpinan dan segenap staf Dinas Pariwisata, sedangkan faktor penghambat adalah masih lemahnya dukungan sumber daya manusia yang berkompeten, adanya pandemi covid-19 menyebabkan keterbatasan kegiatan /akses dan proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Indikator kinerja program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan indikator yakni a) Persentase SDM Pariwisata yang Mendapat Sertifikasi dengan target kinerja 30%, dan b) Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang Mendapat Peningkatan Kapasitas dengan target kinerja 20%. Total anggaran yang mendukung program ini sebesar Rp. 2.483.763.500,-. Adapun capaian kinerja sampai Triwulan I sebesar 0%

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0% . Rata –rata Capaian kinerja sampai Triwulan I tahun 2021 yakni sebesar 0% dengan predikat sangat rendah. Adapun faktor Pendorong adalah adanya kerja sama yang baik antar pejabat teknis dan pihak ketiga yang berjalan maksimal, motivasi dari pimpinan dan segenap staf Dinas Pariwisata, sedangkan faktor penghambat adalah masih lemahnya dukungan sumber daya manusia yang berkompeten, adanya pandemi covid-19 menyebabkan keterbatasan kegiatan /akses dan proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi.

Dari 5 program pendukung dan utama tersebut semuanya berlanjut ke periode RKPD berikutnya. Satu program pendukung yang berlanjut adalah Program penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota dan empat program utama yang masih berlanjut tersebut adalah: 1) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, 3) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan, dan 4) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata.

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Makassar Tahun 2022 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut: a) Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya, b) Tujuan yang dikehendaki, c) Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya, dan d) Kebijakan untuk melaksanakannya. Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Makassar untuk tahun 2022 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2020 (tahun lalu) dan hasil evaluasi capain kinerja tahun 2021 (tahun berjalan) sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2022;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Berdasarkan lampiran 1 dan 2, Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dapat kita lihat, tidak semua program yang telah direncanakan dalam Renstra terealisasi bahkan ada program/kegiatan yang melebihi dari target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan. Keterbatasan anggaran dan kebijakan sebagai dampak dari wabah Virus korona (COVID-19) merupakan salah satu faktor yang

mengakibatkan Dinas Pariwisata Kota Makassar tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Namun secara keseluruhan dari lampiran 1 dan 2 dapat kita lihat bahwa hampir semua program kerja Dinas Pariwisata Kota Makassar sampai tahun 2020 (lampiran 1) terealisasi masih dibawah rata-rata. Begitupun di tahun 2021 (lampiran 2) terealisasi masih dibawah rata-rata.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Berdasarkan fungsi serta kewenangan Dinas Pariwisata Kota Makassar maka indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kota Makassar berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan dari program dan kegiatan adalah;

1. Meningkatnya daya tarik wisata dengan indikator persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara dan persentase peningkatan pergerakan wisatawan nusantara;
2. Meningkatnya daya saing wisata dengan indikator lama tinggal wisatawan; dan
3. Meningkatnya pendapatan daerah dengan indikator persentase PAD dari sektor pariwisata.

Dinas Pariwisata Kota Makassar tahun 2021 mengadakan pengukuran capaian kinerja pada kegiatan yang dananya bersumber dari R-APBD di luar belanja tidak langsung. Dengan memperhatikan Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kota Makassar maka pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Berdasarkan Tabel 2.1, dari 3 indikator kinerja sasaran pelayanan SKPD, ketiga indikator masih belum ada capaiannya (0%).

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
Kota Makassar

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renja OPD Tahun 2021	Realisasi Capaian Triwulan I s/d II	Proyeksi Tahun 2021	Catatan Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)		(15)
1	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Persentase Peningkatan Pergerakan Wisatawan Nusantara			5%	--	5,2%	
				5%	--	5%	
2	Lama Tinggal Wisatawan			3 Hari	--	3 Hari	
3	Persentase PAD dari Sektor Pariwisata			30%	--	31%	

2.3 Isu-isu penting penyelenggaran Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata mempunyai tugas dan fungsi;

- a. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
- b. Mengelola Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis Pariwisata dan Destinasi Pariwisata;
- c. Menetapkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- d. Melakukan pemasaran pariwisata;
- e. Menyediakan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif;
- f. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Merujuk pada tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, terdapat beberapa isu strategis yang dianggap prioritas pada penentuan fokus arah kegiatan sektor Pariwisata, yang harus menjadi perhatian Dinas Pariwisata Kota Makassar dalam penentuan strategi dan kebijakan untuk mewujudkan peran pembangunan Pariwisata di wilayah Kota Makassar. Isu strategis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya dampak promosi dan pemasaran pariwisata

Upaya promosi dan pemasaran pariwisata yang dilakukan selama ini terlihat belum berdampak signifikan karena pemanfaatan media promosi yang belum optimal sehingga promosi serta informasi pariwisata yang ingin disampaikan pun tidak dapat dijangkau secara luas oleh para wisatawan. Selain itu pelaksanaan berbagai bentuk kegiatan baik yang berskala lokal, nasional dan internasional yang dilaksanakan tidak diawali dengan perencanaan yang matang sehingga konten yang disajikan kurang menarik, selain itu kegiatan yang dilaksanakan kurang variatif dan beragam sehingga tujuan utama pelaksanaan kegiatan tersebut yakni meningkatkan angka kunjungan wisatawan menjadi sulit terwujud.

2. Rendahnya kualitas dan daya saing destinasi pariwisata

Kota Makassar memiliki daya tarik wisata yang sangat beragam, baik pantai, pulau, sungai, kuliner, hiburan dan lain sebagainya. Keragaman daya tarik wisata yang ada saat ini tentu membutuhkan sarana dan prasana pendukung dalam pemanfaatannya. Masih rendahnya kualitas aksesibilitas tentu akan mempengaruhi kemampuan wisatawan untuk menjangkau destinasi pariwisata yang ada, selain itu masih terbatasnya sarana akomodasi yang ada pada destinasi menjadi masalah tersendiri yang harus dapat dipecahkan secara bersama, karena ketersediaan sarana dan prasarana pada daya tarik wisata tentu akan mempengaruhi angka kunjungan wisatawan.

3. Masih rendahnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya

Dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif sampai dengan terbentuknya kementerian baru yang mengurus ekonomi kreatif secara khusus, yaitu Kementerian Pariwisata menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif telah menjadi sektor baru dalam menggerakkan perekonomian Negara. Dari data yang dirilis oleh Kementerian Pariwisata bahwa pada periode 2002-2010, ekonomi kreatif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, baik dalam nilai tambah atau PDB, penyerapan tenaga kerja, jumlah perusahaan maupun ekspor. Kontribusi rata-rata PDB tahun 2002-2010 terhadap PDB nasional mencapai 7,74%, tingkat partisipasi tenaga kerja sebesar 7,76%, kontribusi jumlah usaha mencapai 6,77%, kontribusi ekspor mencapai 9,77% dengan kontribusi impor hanya sebesar 1,3%, dan net trade

barang sebesar 33,14%. Dengan melihat data tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif menjadi sebuah keniscayaan, data tersebut menjadi sebuah peluang bagi kota Makassar yang memiliki potensi ekonomi kreatif yang menjanjikan sekaligus menjadi sebuah tantangan khususnya bagi Dinas Pariwisata yang baru saja dibentuk agar mampu memberikan intervensi program dan kegiatan yang efektif dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.

4. Belum optimalnya kompetensi dan kapabilitas SDM Pariwisata

Pembangunan kepariwisataan memerlukan peran aktif SDM, baik aparatur, pelaku usaha dan tenaga kerja, maupun masyarakat. Keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah bidang pariwisata disebabkan minimnya pengetahuan kepariwisataan dan sering terjadinya perpindahan aparatur. Sedangkan tingkat profesionalisme SDM sangat ditentukan oleh kualitas dari pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan (*the right man not in the right place*) serta tidak jelasnya uraian tugas masing-masing staf membuat pembagian tugas menjadi tidak jelas sehingga pekerjaan masih bertumpuk pada beberapa orang staf saja.

5. Belum optimalnya sinergitas dan kemitraan

Kemitraan dan kerjasama Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antar pemerintah, swasta (industri pariwisata) dan masyarakat, sangat diperlukan dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan. Sektor publik atau pemerintah berperan dalam menyediakan infrastruktur dan kerangka regulasi yang dapat mendorong swasta dan masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan kepariwisataan.

Isu-isu strategis tersebut, jika tidak diantisipasi saat ini akan berdampak terhadap pencapaian tujuan dan fungsi Dinas Pariwisata, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Pariwisata Kota Makassar telah menyiapkan 4 program utama, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata diharapkan dapat mengelola daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi pariwisata kabupaten/kota, dan menetapkan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.
- b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata diharapkan dapat melakukan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik,

destinasi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.

- c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual diharapkan dapat menyediakan prasarana (zona kreatif/ ruang kreatif/ kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota.
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022 ditetapkan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2020 dan capaian kinerja dalam RPJMD Kota Makassar 2014-2019, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025, sesuai petunjuk Kementerian Dalam Negeri Nomor 050/6802/Bangda tanggal 16 Desember 2019, perihal Penyusunan RKPD Tahun 2021 Kota Makassar.

Penyusunan RKPD Kota Makassar tahun 2022 juga berpedoman pada Permendagri No 90 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Permendagri 100 tentang penerapan SPM dan serta mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023. Sedangkan untuk sistematika dan tata cara penyusunan RKPD Kota Makassar Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah, Sera Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal tersebut, maka dapat dirumuskan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan

No	Tujuan RKPD 2022	Sasaran RKPD 2022
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	1) Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, dan 2) Meningkatkan Kompetensi Angkatan Kerja dan Pemuda.
2	Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang Bersih dan Efektif	1) Terwujudnya Kelurahan menjadi Pusat Pelayanan Publik yang “Sombere dan Smart”, 2) Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dan 3) Terwujudnya Kemandirian dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
3	Meningkatkan Pembinaan Umat Beragama	1) Meningkatkan Pembinaan Mental dan Spritual, dan 2) Terwujudnya Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat
4	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Migitasi Sosial	1) Meningkatkan Upaya Promotif dan Preventiv Kesehatan melalui Gerakan Masyarakat Perkuat Imunitas, 2) Meningkatkan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Keluarga Berencana, dan 3) Meningkatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Migitasi Sosial
5	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Realisasi Investasi	1) Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru, 2) Terwujudnya Gerakan Masyarakat memperkuat Ketahanan Ekonomi dan Industri Kreatif, dan 3) Terciptanya Iklim Kepastian Hukum Berusaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi untuk Peningkatan Perekonomian Kota
6	Meningkatkan Citra Kota Makassar (City Branding) sebagai Destinasi Wisata Gastronomi, Sejarah, Budaya dan MICE	1) Terlaksananya Penataan Destinasi Budaya dan Sejarah dan 2) Meningkatkan Pelaksanaan Festival dan MICE Skala Nasional dan Internasional
7	Mewujudkan Makassar menjadi “Livable City’ dan “Resilient City”	1) Terwujudnya Makassar sebagai Livable City berbasis Lorong dan komunitas, 2)

	dengan Kualitas Infrastruktur Kota yang Nyaman dan Inklusif	Terwujudnya Makassar sebagai Resilient City Didukung Penyediaan Fasilitas Pemerintahan, 3) Tersedianya Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik yang Didukung Perlengkapan Jalan, 4) Tersedianya Jaringan Pedestrian yang Nyaman dan Didukung Koridor Hijau dan Median Jalan sebagai Konektivitas Pejalan Kaki dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan 5) Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase dan Penanganan Banjir
8	Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Lestari	1) Meningkatnya Sistem Penanganan Persampahan, dan 2) meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Arah kebijakan pembangunan sebagai urusan perencanaan daerah di Kota Makassar masih mengacu pada RPJMD Kota Makassar Tahun 2022 s/d 2026. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Visi Kota Makassar 2022 s/d 2026 adalah: **” Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang "Somber" & Smart City" dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua”** sehingga untuk menjamin konsistensi serta kesinambungan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang menjadi arahan RPJMD untuk periode 2022-2026.

berdasarkan tabel 2.2 Arah kebijakan ekonomi Kota Makassar 2022 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah maka Dinas pariwisata memiliki posisi di misi 2 yakni “Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Budaya Menuju Masyarakat Sejahtera dengan Imunitas Ekonomi dan Kesehatan Kota yang Kuat untuk Semua” dengan tujuan “Meningkatkan Citra Kota Makassar (*City Branding*) sebagai Destinasi Wisata Gastronomi, Sejarah, Budaya dan MICE” pada sasaran “Meningkatnya Pelaksanaan Festival dan MICE Skala Nasional dan Internasional” (sasaran ke-15) dalam RKPD Kota Makassar Tahun 2022.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD,

dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kota, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pariwisata maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kota diuraikan pada tabel 2.3 berikut;

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Pelaksanaan Kegiatan di Tahun 2022
Kota Makassar

Nama SKPD : Dinas Pariwisata Kota Makassar

NO	PERMASALAHAN	USULAN	ALAMAT	KOEFISIEN	ALASAN
POKIR					
1	Warga An. Husain mengeluhkan terkait masalah pendidikan yang perlu perhatian dari Dinas terkait	Pengembangan pendidikan	Jl. Mannuruki 2 RT. 02 RW. 09 Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	1 Lokasi	Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, Usulan SKPD yakni Dinas Pendidikan
2	Sistem Zonasi SMA yang dilakukan banyak merugikan warga Tambasa karena Tambasa tidak masuk Zonasi	Pengembangan pendidikan	Jl. Tambasa 2 No. 16, Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea Jaya	1 Lokasi	Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, Usulan SKPD yakni Dinas Pendidikan
3	Terkait dengan permintaan nelayan agar diberikan bantuan berupa alat tangkap hasil laut	Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan	Pulau Lae-Lae RW.01/RT. 01 Depan Kantor PLN Lae-Lae Kel. Lae-Lae Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Ujung Pandang, Lae-Lae	1 Lokasi	Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, Usulan SKPD yakni Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2D)
4	UKM yang banyak di sekitar jalan Rajawali, berharap dapat bantuan untuk terus bisa berusaha di masa pandemi ini	Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan	Jl. Rajawali Lr. 10 Kel. Lette Kec. Mariso, Kota Makassar, Mariso, Lette	1 Kelompok	Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, Usulan SKPD yakni Dinas Koperasi
MASYARAKAT					
1	Renovasi Sanggar Seni	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jl. Rappocini Raya Lr. 3, Kota Makassar, Rappocini	20 Meter ²	Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, Usulan SKPD yakni Dinas Kebudayaan

2	Pengadaan Lampu Jalan, Jalan tersebut gelap/rawan sering terjadi perang kelompok	Penyediaan Infrastruktur	Jl. Inspeksi Kanal Kerung-Kerung (RT. 010, RW 003/RT 011 RW 004) Kota Makassar	10 Titik	Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, Pengadaan lampu lorong dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU)
3	Banyaknya anak yang putus sekolah membutuhkan ijazah (Paket A & Paket C)	Pengembangan pendidikan	Kelurahan Bungaeyaya, Kota Makassar	40 Orang	Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, Usulan SKPD yakni Dinas pendidikan
4	Pelatihan Kuliner untuk menopang kehidupan keluarga	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jalan Ade Irma Nasution RW 02, Kota Makassar, Tallo, Wala-Walaya	1 Kegiatan	Usulan Diterima, sub kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (Bidang Pengembangan SDM Pariwisata)
5	Pelatihan Guide karena daerah wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi masyarakat	Kelurahan Gusung, Kota Makassar, Ujung Tanah, Gusung	15 Orang	Usulan Diterima, sub kegiatan Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar (Bidang Pengembangan SDM Pariwisata)
NO	PERMASALAHAN	USULAN	ALAMAT	KOEFISIEN	ALASAN
6	Pelatihan Tata Rias (Salon), Pelatihan Service AC, dan Pelatihan Service Handphone	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jl. Belibis RW. 004, Kota Makassar, Mariso, Kec. Mariso	240 Peserta	Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, Pelatihan penata rias, pelatihan service AC, dan pelatihan service handphone sesuai dengan tupoksi Dinas Tenaga Kerja / Dinas Perdagangan
7	Lampu Lorong dapat menambah keindahan lingkungan dan meningkatkan keamanan	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jl. Cendrawasih Lorong 15 RT 02/03 RW 04, Kota Makassar, Mamajang, Karang Anyar	24 Titik	Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, Pengadaan lampu lorong dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU)
8	Pembangunan Dermaga Sengka Batu merupakan akses menuju kelurahan Lakkang serta wisata bahari dan bisnis perikanan bagi pesisir Sangka Batu dan Tallo	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jalan Teuku Umar 15 RT 003 RW 005, Kota Makassar, Tallo, Buloa	250 M2	Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, pembangunan dermaga (fisik) untuk bisnis perikanan bagi pesisir dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU)
9	Pelatihan Kuliner	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	RW 01 RW 02, RW 03 dan RW 04 Kota Makassar, Tallo, La'Latang	50 Orang	Usulan Diterima, sub kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (Bidang Pengembangan SDM Pariwisata)
10	Pengadaan Lampu Lorong	Penyediaan Infrastruktur	RW 01 (82 titik) RW 02 (36 titik), Kota Makassar, Tallo, La'Latang	118 Titik	Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, Pengadaan lampu lorong dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU)

Berdasarkan tabel 2.3 dapat diketahui bahwa kegiatan yang diusulkan di Musrenbang tahun 2021 terdiri atas dua kategori yakni berdasarkan Pokir (Reses) dan usulan Masyarakat. Dari kedua kategori tersebut, semua pokir (Reses) tidak ada yang dapat diakomodir. Sementara usulan Masyarakat ada yang dapat

diakomodir dan ada yang tidak dapat diakomodir, kegiatan yang **dapat diakomodir** adalah: 1.) Pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif dengan alamat jalan Ade Irma Nasution RW 02, Kota Makassar, Tallo, Wala-Walaya, 2.) Pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat dengan alamat kelurahan Gusung, Kota Makassar, Ujung Tanah, Gusung sebanyak 15 Orang, dan 3.) Pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif dengan alamat RW 01, RW 02, RW 03, dan RW 04 Kota Makassar, Tallo, La'Latang sebanyak 50 Orang.

Sementara kegiatan yang **tidak dapat diakomodir** adalah:

POKIR/RESES :

1. Pengembangan Pendidikan, Jl. Mannuruki 2 RT. 02 RW. 09 Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Tamalate, Mangasa. Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, Usulan SKPD yakni Dinas Pendidikan;
2. Pengembangan Pendidikan, Jl. Tambasa 2 No. 16, Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea Jaya. Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, Usulan SKPD yakni Dinas Pendidikan;
3. Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan, Pulau Lae-Lae RW.01/RT. 01 Depan Kantor PLN Lae-Lae Kel. Lae-Lae Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Ujung Pandang, Lae-Lae. Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, Usulan SKPD yakni Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2D);
4. Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan, Jl. Rajawali Lr. 10 Kel. Lette Kec. Mariso, Kota Makassar, Mariso, Lette. Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, Usulan SKPD yakni Dinas Koperasi;
5. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Jl. Rappocini Raya Lr. 3, Kota Makassar, Rappocini. Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, Usulan SKPD yakni Dinas Kebudayaan;
6. Penyediaan Infrastruktur, Jl. Inspeksi Kanal Kerung-Kerung (RT. 010, RW 003/RT 011 RW 004) Kota Makassar. Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, Pengadaan lampu lorong dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU);

7. Pengembangan pendidikan, Kelurahan Bungaejaya, Kota Makassar. Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, Usulan SKPD yakni Dinas pendidikan;
8. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif, Jl. Belibis RW. 004, Kota Makassar, Mariso, Kec. Mariso. Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, Pelatihan penata rias, pelatihan service AC, dan pelatihan service handphone sesuai dengan tupoksi Dinas Tenaga Kerja / Dinas Perdagangan;
9. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Jl. Cendrawasih Lorong 15 RT 02/03 RW 04, Kota Makassar, Mamajang, Karang Anyar. Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, Pengadaan lampu lorong dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU);
10. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Jalan Teuku Umar 15 RT 003 RW 005, Kota Makassar, Tallo, Buloa. Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, pembangunan dermaga (fisik) untuk bisnis perikanan bagi pesisir dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU);
11. Penyediaan Infrastruktur, RW 01 (82 titik) RW 02 (36 titik), Kota Makassar, Tallo, La'Latang. Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, Pengadaan lampu lorong dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Sementara itu, berdasarkan pengendalian hasil musrenbang tahun 2020 yang pelaksanaan kegiatannya di tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel. 2.4
Pengendalian Hasil Musrenbang Tahun 2020
Pelaksanaan Kegiatan di Tahun 2021
Dinas Pariwisata Kota Makassar

Nama SKPD : Dinas Pariwisata Kota Makassar

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				
3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Kantor Lurah Gusung	Jumlah SDM Kepariwisataaan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) yang mendapat pelatihan dasar	35 Orang	Kegiatan belum dilaksanakan

Berdasarkan tabel 2.4, kegiatan pemangku jabatan yang diakomodir belum dilaksanakan karena jadwal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di triwulan II dan III tahun 2021.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Secara umum sasaran kementerian sudah tertuang dalam program dan kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata. Faktor–faktor penghambat dan faktor–faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Telaahan terhadap Sasaran Renstra Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
1.	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi	Tingkat persentase kontribusi pariwisata terhadap total PDRB masih rendah, bahkan mengalami penurunan sebesar 0,38% di tahun 2020
2.	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional	
3.	Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan	Masih meningkatnya kasus COVID-19 di Kota Makassar akan berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan
4.	Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional	Masih rendahnya fasilitas penunjang/amenitas pariwisata yang terbangun
5.	Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan	
6.	Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional	Fasilitasi bagi pelaku ekonomi kreatif yang belum optimal
7.	Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	
8.	Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian	Belum tersedianya produk hukum terkait bidang kepariwisataan (RIPPARDA Kota Makassar)
9.	Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif	Lemahnya data dan analisa serta kajian terkait kepariwisataan yang dilakukan oleh bidang teknis terkait
10.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif	Jumlah tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi masih minim

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022 ditetapkan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2020 dan capaian kinerja dalam RPJMD Kota Makassar 2014-2019, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025, sesuai petunjuk Kementerian Dalam Negeri Nomor 050/6802/Bangda tanggal 16 Desember 2019, perihal Penyusunan RKPD Tahun 2022 Kota Makassar.

Penyusunan RKPD Kota Makassar tahun 2022 juga berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Permendagri 100 tentang penerapan SPM dan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Sedangkan untuk sistematika dan tata cara penyusunan RKPD Kota Makassar Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal tersebut, maka dapat dirumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022 dengan berfokus pada misi 1, 2, dan 3 yakni :

1. Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik Kelas Dunia Bersih dari Indikasi Korupsi;
2. Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Budaya Menuju Masyarakat Sejahtera dengan Imunitas Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kesehatan Kota yang Kuat untuk Semua;
3. Restorasi Ruang Kota yang Inklusif menuju Kota Nyaman Kelas Dunia yang “*Sombere’ dan smart*” city untuk Semua

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal tersebut, maka dapat dirumuskan Tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022 dengan berfokus pada ketiga misi tersebut sehingga arah kebijakan yang berfokus pada tujuan :

- 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) (1.1);
- 2) Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Realisasi Investasi (2.2);
- 3) Meningkatkan Citra Kota Makassar (City Branding) sebagai Destinasi Wisata Gastronomi, Budaya, Sejarah dan MICE (2.3);
- 4) Mewujudkan Makassar menjadi “Livable City” dan “Resilient City” dengan Kualitas Infrastruktur Kota yang Nyaman dan Inklusif (3.1).

Melalui tujuan ini, Pembangunan Makassar diarahkan untuk dapat memberdayakan kualitas sumber daya manusia, kekuatan ekonomi masyarakat dan menguatkan daya saing ekonomi kota dengan berfokus pada sasaran :

1. Meningkatnya Kompetensi Angkatan Kerja dan Pemuda (1.1.2);
2. Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat ketahanan Ekonomi dan Industri Kreatif (2.2.2);
3. Meningkatnya Pelaksanaan Festival dan MICE Skala Nasional dan Internasional (2.3.2);
4. Terwujudnya Makassar sebagai “Liveable City” Berbasis Lorong dan Komunitas (3.1.1).

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pariwisata Kota Makassar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. Penyusunan rencana dan program di bidang promosi Pariwisata;
- c. Penyusunan rencana dan program penyelenggaraan kegiatan pasar wisata daerah;
- d. Penyusunan rencana dan program pengembangan sumber daya dan peran serta masyarakat;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap perkembangan usaha industri kepariwisataan;

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pariwisata Kota Makassar

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar Tahun 2022 adalah **Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata terhadap Struktur Ekonomi Daerah.**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Daya Tarik Wisata;
2. Meningkatnya Daya Saing Wisata; dan
3. Meningkatnya Pendapatan Daerah;

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun 2022
1	Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata terhadap Struktur Ekonomi Daerah	Kontribusi Pariwisata terhadap Total PDRB (%)			2,3%
			Meningkatnya Daya Tarik Wisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	5 %
				Persentase peningkatan pergerakan wisatawan nusantara	3 %
			Meningkatnya Daya Saing Wisata	Lama tinggal wisatawan	3 Hari
			Meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata	Persentase PAD dari sektor pariwisata	24,30 %

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA****4.1 Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pariwisata**

Berdasarkan Tujuan, Sasaran, maka disusunlah program-program Dinas Pariwisata untuk Tahun 2021 sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Program prioritas yang dilaksanakan ditujukan dalam upaya pencapaian target sasaran yang harus tercapai pada tahun 2021 dan berdasarkan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata. Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk matrik/tabel yang menggambarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif seperti pada lampiran 3.

Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Makassar Tahun 2021 sebagai penjabaran dari Rencana Kerja yang telah disempurnakan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 Pemerintah Kota Makassar yang disusun dengan memperhatikan kondisi strategis lingkup organisasi Pemerintah Kota Makassar.

Program dan kegiatan dijabarkan sesuai arah kebijakan pokok Pemerintah Kota Makassar yang berfokus pada kebijakan pengembangan kawasan, tata ruang dan lingkungan dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program Utama

Program Dinas Pariwisata Kota Makassar yang terkait dengan Program Utama terdiri dari :

- **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dilakukan dengan kegiatan indikatif antara lain :**
 1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - a. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan;
 - a. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - c. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - a. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - b. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - c. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi
 - d. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - e. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan;
 - a. Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
 - b. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
 - c. Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata

- **Program Pemasaran Pariwisata, dilakukan dengan kegiatan :**
 1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - a. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

- b. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota
 - c. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
 - d. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri
- **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dilakukan dengan kegiatan indikatif antara lain :**
- 1. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi, dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - a. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
 - 2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengembangan Riset
 - b. Pengembangan Pendidikan
 - c. Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan
 - d. Penyediaan Infrastruktur
 - e. Pengembangan Sistem Pemasaran
 - f. Pemberian Insentif
 - g. Fasilitasi Kekayaan Intelektual
 - h. Perlindungan Hasil Kreativitas
 - i. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
- **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dilakukan dengan kegiatan indikatif antara lain :**
- 1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

- c. Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata untuk Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/Siswa)
 - d. Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
 - e. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
 - f. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
 - g. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dengan sub kegiatan :
 - a. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

Program Pendukung

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan indikatif antara lain :**
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - c. Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Mebel
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Untuk dapat memahami jenis dan pilihan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diajukan untuk ditampung dalam R-APBD Tahun Anggaran 2022, maka seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan pada lampiran 3;

Berdasarkan lampiran 3 dapat diketahui bahwa total pagu yang dianggarkan pada Renja Tahun 2022 sebesar Rp. 32.107.000.000,- yang terdiri atas 4 program utama dan 1 program pendukung. Program utama terdiri dari 7 kegiatan dengan 21 sub kegiatan dan program pendukung terdiri atas 7 kegiatan dengan 28 sub kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Makassar merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022. Rencana kerja ini disusun dengan berpedoman pada RPJP 2020-2025, RPJMD 2021-2026, RKPD 2022, SPM, dan SDGs Kota Makassar dan berdasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana kerja ini terkait dengan kebijakan pokok RPJMD 2021-2026 dan RKPD 2022 yang arah kebijakannya berfokus pada Peningkatan Peran Sektor Pariwisata terhadap Struktur Ekonomi Daerah, Kebijakan ini kemudian dijabarkan oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar ke dalam Program dan Kegiatan Tahun 2022.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi OPD diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan, serta mendukung visi dan misi Kepala Daerah Kota Makassar.

Program dan kegiatan indikatif yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 akan dibiayai dengan sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar oleh karena itu komitmen pimpinan dan segenap staf Dinas Pariwisata Kota Makassar harus didukung oleh segenap aparatur daerah dan legislatif serta dukungan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan di dalam mengimplementasikan Rencana Kerja ini.

Semoga rencana yang ditetapkan dalam Rencana Kerja ini dapat dianalisis dan dipertimbangkan penguangannya dalam R-APBD Tahun Anggaran 2022 mendatang.

FORMULIR E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Makassar
Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Makassar
Periode Pelaksanaan : Tahun 2020

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2020)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2020)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2020 (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET	
								I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.			
								K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K			Rp.
1	2	3	4	4.a	5			6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5 * 100%		12	13	
2	2		URUSAN PILIHAN																			
2.02	2		Pariwisata																			
2.02	2	02	01		Dinas Pariwisata																	
2.02	2	02	01	01	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kelompok Sadar Wisata	Kelompok	5		0		0					0.00		0.00			
						Jumlah Obyek Wisata Baru	Objek	1		0		0					0.00		0.00			
						Persentase Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan	%	5		0		0					0.00		0.00			
						Jumlah Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) wilayah yang didukung/ difasilitasi menjadi destinasi wilayah halal	%	1,25	3,346,804,000	0	258,150,000	0	227,450,000				0.00	485,600,000	0.00	14.51	DISPAR	Indikator program dicapai di akhir tahun
						Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikelola secara terpadu	Kawasan	1		1		0					1.00		100.00			
						Jumlah kemitraan usaha pariwisata	Kemitraan	1		0		0					0.00		0.00			
	2	02	01	01	02	Pembangunan Fasilitas Pariwisata di Daya Tarik Wisata	Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) yang dibenahi	DTW	1	1,000,000,000	433,950,000	-	10,500,000	-	11,200,000		0	21,700,000	0.00	2.17		Indikator tercapai di akhir tahun
	2	02	01	01	08	Pembentukan Kelompok Sadar Wisata	Jumlah kelompok sadar wisata	Kelompok	10	300,000,000	73,400,000	2	34,400,000	-	-		2	34,400,000	20.00	11.47		
	2	02	01	01	10	Pengawasan dan Pemantauan Industri Pariwisata	Jumlah bidang usaha pariwisata yang dibenahi	Bidang	13	350,000,000	109,200,000	13	18,200,000	-	10,500,000		13	28,700,000	100.00	8.20		
	2	02	01	01	13	Pengelolaan UPT Pantai Losari	Kontribusi Destinasi Pantai Losari terhadap PAD Kota Makassar	%	0.031	1,000,000,000	924,684,000	-	195,050,000	-	205,750,000		0	400,800,000	0.00	40.08		Indikator tercapai di akhir tahun
	2	02	01	01	14	Pelatihan Pemandu Wisata, Homestay dan Tata Kelola Destinasi (DAK Non Fisik)	Jumlah peserta pelatihan	Orang	305	696,804,000	256,370,000	-	-	-	-		0	-	0.00	0.00		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		24.00	12.38			
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)			
2.02	2	02	01	01	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Kunjungan	925,147		0		0					0		0.00			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2020)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2020)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2020 (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET							
					K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.													
1	2	3	4	4.a	5			6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5 * 100%		12	13							
2.02	2	02	01	02	PEMASARAN DAN PROMOSI PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Kunjungan	18,484	4,274,000,000	1,778,784,000	0	491,297,000	0	39,300,000		530,597,000	0	7.71	DISPAR									
					Rata-rata lama kunjungan wisatawan	Hari	3	3			0		3		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	
					Persentase PAD dari sektor pariwisata	%	29,32	0			0		0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	%	2,29	0			0		0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Jumlah Tourist Information Centre (TIC)	Unit	10	1			0		1		0		1			0	1	0	1	0	10.00			
	2	02	01	02	Pengembangan Promosi Pariwisata	Jumlah promosi dan pemasaran pariwisata di dalam dan di luar negeri	Media	15	3,000,000,000	1,431,168,000	2	462,397,000	-				2	462,397,000	13.33	15.41								
	2	02	01	02	Pusat Informasi Pariwisata	Tersedianya operasional pusat informasi pariwisata	TIC	10	774,000,000	263,616,000	1	28,900,000		39,300,000			1	68,200,000	10.00	8.81								
	2	02	01	02	Analisis Sektor Pariwisata	Jumlah dokumen Analisis Sektor Pariwisata	Dokumen	1	500,000,000	84,000,000	-	-		-			0	-	0.00	0.00		Indikator dicapai pada akhir semester						
Rata-rata capaian kinerja (%)																		7.78	8.07									
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)									
2.02	2	02	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA	Indeks Kepuasan Wisatawan terhadap Industri Kepariwisata	Skala	3,00	1,779,380,000	1,209,216,000	0	205,200,000	0	347,892,192		553,092,192	0.00	31.08	DISPAR	Indikator program dicapai di akhir tahun								
					Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata yang Bersertifikat	%	14,10	0			0		0		0		0				0	0	0	0	0	0	0	
					Jumlah Pekerja pada Industri Pariwisata dalam Promosi terhadap Total Pekerja	%	2,25	0			0		0		0		0				0	0	0	0	0	0	0	0
	2	02	01	03	Pembinaan wajib sertifikasi kompetensi pariwisata	Jumlah peserta yang disertifikasi	orang	500	572,700,000	368,900,000	200	-		-			200	-	40.00	0.00								
	2	02	01	03	Sertifikasi kompetensi bidang pariwisata	Jumlah tenaga kerja yang ikut uji kompetensi	orang	500	456,680,000	497,500,000	200	-	100	257,500,000			300	257,500,000	60.00	56.39								
	2	02	01	03	Pengawasan wajib sertifikasi kompetensi pariwisata	Jumlah tenaga kerja yang diawasi	orang	4,800	750,000,000	342,816,000	4,500	205,200,000		90,392,192			4500	295,592,192	93.75	39.41								
Predikat Kinerja																		Rendah (R)	Sangat Rendah (SR)									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2020)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2020)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2020 (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET			
								I		II		III		IV										
					K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	
1	2	3	4	4.a	5			6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5 * 100%		12	13			
2.02	2	02	01	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	Nilai Produksi Pelaku Ekonomi Kreatif	Rupiah	875,000,000			0		0					-		0.00	1.22	DISPAR		
						Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Pelaku Usaha	189			0		0				-		0.00					
						Peresentase Pelaku Ekonomi Kreatif berbasis IPTEK	%	100	4,450,000,000	391,356,750	0	29,730,000	0	24,500,000			-	54,230,000	0.00					
						Jumlah Kesepakatan Pentaheliks dalam Pembangunan Ekosistem Ekonomi Kreatif	MoU	5			0		0				-		0.00					
	2	02	01	04	03	Festival Seni Pertunjukan	Jumlah pelaku seni yang ikut berpartisipasi	Kelompok	60	2,000,000,000	0	-					0	0	0.00	0.00				
	2	02	01	04	07	Koordinasi Kemitraan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah kerjasama Pentahelix	Dokumen	5	600,000,000	0	-					0	0	0.00	0.00				
	2	02	01	04	08	Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta yang ikut berpartisipasi	Orang	375	850,000,000	245,000,000	-					0	0	0.00	0.00				
	2	02	01	04	13	Pengelolaan UPT Event Kepariwisataaan	Jumlah pelaksanaan event-event kepariwisataaan Kota Makassar	Event	60	1,000,000,000	146,356,750	3	29,730,000	2	24,500,000			5	54,230,000	8.33	5.42			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	2.08	1.36						
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)						
2.02	2	02	01	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100			25		25					50		50.00	44.96	DISPAR		
						Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	%	100	2,237,834,000	2,643,152,500	25	583,340,600	25	422,839,098			50	1,006,179,698	50.00					
						Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	%	100			25		25				50		50.00					
	2	02	01	50	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Pelayanan Rekening Telepon, Listrik & Air Kantor	Jenis	3	28,800,000	220,200,000	4	45,795,362		27,003,501		-	-	4	72,798,863	133.33	252.77		
	2	02	01	50	03	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya bahan dan jasa kebersihan kantor	Jenis	12	120,000,000	33,316,000	-	12		16,658,000		-	-	12	16,658,000	100.00	13.88		
	2	02	01	50	04	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis lainnya	Jumlah Tenaga Kontrak	Orang	42	504,000,000	648,000,000	35	148,500,000		166,500,000		-	-	35	315,000,000	83.33	62.50		
	2	02	01	50	05	Penyediaan bahan bacaan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	Terbitan	8	25,000,000	23,856,000	8	2,900,000		3,580,000		-	-	8	6,480,000	100.00	25.92		

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2020)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2020)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2020 (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
												I		II		III		IV							
												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2					3	4	4.a	5			6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5 * 100%		12	13
	2	02	01	50	06	Pengelolaan administrasi perkantoran	Tersedianya bahan-bahan pengelolaan administrasi perkantoran	Bulan	12	890,000,000	623,056,500	3	36,150,000	3	140,473,000		-	-	6	176,623,000	50.00	19.85			
	2	02	01	50	07	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi pelaksanaan perjalanan dinas	Kali	85	650,000,000	1,035,000,000	38	348,584,488	7	45,200,572		-	-	45	393,785,060	52.94	60.58			
	2	02	01	50	09	Penyediaan jasa jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja yang mendapat jasa jaminan sosial	Orang	42	20,034,000	59,724,000	35	1,410,750		23,424,025		-	-	35	24,834,775	83.33	123.96			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			86.13	79.92					
Predikat Kinerja																			Tinggi (T)	Tinggi (T)					
2.02	2	02	01	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah	%	100	1,409,000,000	701,439,460	25	30,857,400	25	310,726,300				50	341,583,700	50.00	24.24	DISPAR		
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik		%	100	25			25		50		50.00									
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pakaian Dinas ASN Perangkat Daerah		%	100	25			25		50		50.00									
	2	02	01	51	02	Pengadaan komputer	Jumlah pengadaan komputer	Unit	10	150,000,000	130,750,000		-	16	129,662,400				16	129,662,400	160.00	86.44			
	2	02	01	51	03	Pengadaan meja dan kursi kerja/ rapat	Jumlah pengadaan mebeleur	Unit	94	120,000,000	45,262,500		-	11	45,262,500				11	45,262,500	11.70	37.72			
	2	02	01	51	04	Pengadaan alat komunikasi	Jumlah pengadaan alat komunikasi	Unit	1	35,000,000	21,503,160		-	1	20,100,000				1	20,100,000	100.00	57.43			
	2	02	01	51	05	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan	Unit	1	42,000,000	27,556,450	1	2,704,800		12,564,800				1	15,269,600	100.00	36.36			
	2	02	01	51	06	Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor	Jumlah kendaraan dinas	Unit	25	427,500,000	264,292,350	25	28,152,600		63,152,600				25	91,305,200	100.00	21.36			
	2	02	01	51	07	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga	Jumlah pendingin ruangan / AC yang dipelihara	Unit	20	32,000,000	30,000,000		-	21	15,000,000				21	15,000,000	105.00	46.88			
	2	02	01	51	08	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Jumlah komputer dan laptop yang dipelihara	Unit	30	30,000,000	25,000,000		-	30	10,000,000				30	10,000,000	100.00	33.33			
	2	02	01	51	09	Pemeliharaan rutin/berkala meja dan kursi kerja/rapat	Jumlah meja dan kursi kerja/rapat yang dipelihara	Unit	45	16,500,000	10,000,000		-	-					0	0	0.00	0.00			
	2	02	01	51	10	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung tempat kerja	Jumlah gedung yang dipelihara	Gedung	1	150,000,000	100,000,000		-	-					0	0	0.00	0.00			
	2	02	01	51	12	Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi	Jumlah STNK kendaraan dinas yang dibayarkan	Unit	26	15,500,000	14,000,000		-	-					0	0	0.00	0.00			
	2	02	01	51	13	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik	Jenis	12	110,000,000	33,075,000		-	12	14,984,000				12	14,984,000	100.00	13.62			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2020)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2020)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2020 (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
								I		II		III		IV							
					K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	4.a	5			6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5 * 100%		12	13
	2 02 01 51 14	Pengadaan aplikasi sistem informasi manajemen (SIM)	Jumlah aplikasi sistem informasi manajemen	Aplikasi	1	150,000,000	0		-		-					0	0	0.00	0.00		
	2 02 01 51 15	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Pasang	161	130,500,000	0		-		-					0	0	0.00	0.00		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	59.75	25.63			
Predikat Kinerja																	Rendah (R)	Sangat Rendah (SR)			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						8,521,552,710		1,598,575,000		1,372,707,590						2,971,282,590					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																	40.72	26.55			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)			

* **Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :**

1. Komitmen Kepala Dinas Pariwisata dalam mencapai peningkatan kinerja angka kunjungan wisatawan

* **Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :**

1. Beberapa program dan kegiatan seperti indeks kepuasan dan pembenahan sarana kepariwisataan masih dalam proses sehingga kinerja belum dapat diukur
2. Wabah/Pendemi Global COVID 19 menyebabkan dilaksanakan Refocussing anggaran sehingga banyak kegiatan dikurangi bahkan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

* **Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :**

1. Kegiatan harus dapat terus dioptimalkan dalam upaya Pencapaian Target Kinerja Dinas Pariwisata

* **Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :**

1. Program kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan Dinas Pariwisata

Disusun,

Makassar, 2020

**KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA MAKASSAR**

Ir. Hj. Rusmayani Madjid, M.SP
Nip. 19650305 199010 2 001

Dievaluasi,

Makassar, 2020

**KEPALA BAPPEDA
KOTA MAKASSAR**

(_____)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATA N	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2020)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2020)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2020 (%)		SKPD PENANG GUNG JAWAB	KET
								I		II		III		IV							
					K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	4.a	5			6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5 * 100%		12	13

FORMULIR E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Makassar
Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Makassar
Periode Pelaksanaan : Tahun 2021

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2021 (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET	
					K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.			
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4	4.a	5			6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5 * 100%		12	13	
		URUSAN PILIHAN																				
3		Pariwisata																				
3	3.26	Dinas Pariwisata																				
3	3.26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pariwisata	%	100%	10,270,218,100	10,270,218,100	25%	1,694,075,404	0.00	0					0	1,694,075,404	25%	16.50	DISPAR	Indikator program dicapai di akhir tahun
3	3.26	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	10	115,715,000	115,715,000		5,000,000						0	5,000,000	0.00	4.32		
3	3.26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan	Dokumen	3	53,990,000	53,990,000		5,000,000					0	5,000,000	0.00	9.26		
3	3.26	01	2.01	02	Korodinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Dihasilkan	Dokumen	1	7,050,000	7,050,000							0	0	0.00	0.00		
3	3.26	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Disusun	Dokumen	1	6,950,000	6,950,000							0	0	0.00	0.00		
3	3.26	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang Dihasilkan	Dokumen	1	6,700,000	6,700,000							0	0	0.00	0.00		
3	3.26	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Prubahan DPA yang Disusun	Dokumen	1	6,725,000	6,725,000							0	0	0.00	0.00		
3	3.26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja yang Dihasilkan	Dokumen	3	20,580,000	20,580,000							0	0	0.00	0.00		
3	3.26	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang Dihasilkan	Dokumen	2	13,720,000	13,720,000							0	0	0.00	0.00		
3	3.26	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	Dokumen	5	8,772,605,400	8,772,605,400		1,560,901,609						0	1,560,901,609	0.00	17.79		
3	3.26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan dalam Setahun	orang	61	8,384,045,400	8,384,045,400	61	1,502,921,609					61	1,502,921,609	100.00	17.93		
3	3.26	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan	orang	23	316,560,000	316,560,000	21	45,980,000					21	45,980,000	91.30	14.52		
3	3.26	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga Administrasi Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi (Non PNS) yang Digunakan	orang	6	72,000,000	72,000,000	6	12,000,000					6	12,000,000	100.00	16.67		
3	3.26	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Administrasi Umum yang Tersedia	Jenis	7	351,398,000	351,398,000		27,587,600						0	27,587,600	0.00	7.85		
3	3.26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	7	23,515,000	23,515,000							0	0	0.00	0.00		
3	3.26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	Jenis	5	42,927,000	42,927,000							0	0	0.00	0.00		
3	3.26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis	13	38,584,000	38,584,000							0	0	0.00	0.00		
3	3.26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	Jenis	1	34,132,000	34,132,000							0	0	0.00	0.00		
3	3.26	01	2.06	06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Media	6	12,240,000	12,240,000	6	2,740,000					6	2,740,000	100.00	22.39		
3	3.26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kali	17	200,000,000	200,000,000	4	24,847,600					4	24,847,600	23.53	12.42		
3	3.26	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia	Jenis	2	50,000,000	50,000,000		0						0	0	0.00	0.00		
3	3.26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Unit	1	50,000,000	50,000,000							0	0	0.00	0.00		

NO	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2021 (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET										
											I		II		III		IV																	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2				3				4			4.a			5				6		7		8		9		10 = 6+7+8+9				11 = 10/5 * 100%		12	13
3	3.26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jenis	4	635,221,800	635,221,800			100,586,195						0	100,586,195	0.00	15.83												
3	3.26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat dan ekspedisi yang disediakan	orang	22	437,949,600	437,949,600	21	63,000,000							21	63,000,000	95.45	14.39												
3	3.26	01	2.08	02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa pelayanan rekening telepon, listrik dan air kantor	Rekening	3	197,272,200	197,272,200	3	37,586,195							3	37,586,195	100.00	19.05												
3	3.26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Jenis	5	345,277,900	345,277,900			0						0	0	0.00	0.00												
3	3.26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas	Unit	1	28,336,800	28,336,800									0	0	0.00	0.00												
3	3.26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	Unit	25	244,721,100	244,721,100									0	0	0.00	0.00												
3	3.26	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meja dan kursi kerja/rapat yang dipelihara	Buah	20	11,200,000	11,200,000									0	0	0.00	0.00												
3	3.26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	62	61,020,000	61,020,000									0	0	0.00	0.00												
Rata-rata capaian kinerja (%)																			26.53	5.51														
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)														
3	3.26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Daya Tarik Wisata Kota Makassar yang Dikelola	DTW	1	6,242,600,800	6,242,600,800	0.00	216,200,000	0.00	0					0.00	216,200,000	0.00	3.46	DISPAR	Indikator program dicapai di akhir tahun										
3	3.26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata Kota Makassar yang Dikelola	DTW	1	2,200,000,000	2,200,000,000	-	-	-	-					0	-	0.00	0.00												
3	3.26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata Kota Makassar yang dikembangkan	DTW	5	2,200,000,000	2,200,000,000									0		0.00	0.00												
3	3.26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota Makassar yang Dilaksanakan	Kawasan	1	1,400,000,000	1,400,000,000		20,000,000	-	-					0	20,000,000	0.00	1.43												
3	3.26	02	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kota Makassar yang dilaksanakan	KSW	12	1,400,000,000	1,400,000,000	12	20,000,000							12	20,000,000	100.00	1.43												
3	3.26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sasaran Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota Makassar yang Diadakan dan Mendapat Pemeliharaan	Prasarana	1	2,336,207,800	2,336,207,800		190,600,000	-	-					0	190,600,000	0.00	8.16												
3	3.26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata Kota Makassar yang diadakan dan mendapat pemeliharaan	Bulan	12	1,473,632,800	1,473,632,800	3	190,600,000							3	190,600,000	25.00	12.93												
3	3.26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan destinasi pariwisata Kota Makassar dengan memberdayakan masyarakat	Destinasi	12	862,575,000	862,575,000									0	-	0.00	0.00												
3	3.26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pendaftaran Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kota Makassar yang Disediakan	Jenis TDUP	13	306,393,000	306,393,000	-	5,600,000	-	-					0	5,600,000	0.00	1.83												
3	3.26	02	2.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kota Makassar yang disediakan	Usaha	1,000	306,393,000	306,393,000		5,600,000							0	5,600,000	0.00	1.83												
Rata-rata capaian kinerja (%)																			25.00	3.24														

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2021 (%)		SKPD PENANGG UNG JAWAB	KET
								I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.		
					K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	4.a	5			6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5 * 100%		12	13
															Predikat Kinerja		Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)			
3	3.26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	Wisnus	925,147	5,852,545,600	5,852,545,600	60,000,000	0				0	60,000,000	0.00	1.03	DISPAR			
				Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Wisman	18,484								0		0.00					
3	3.26	03	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Destinasi	58	5,852,545,600	5,852,545,600	60,000,000					0	60,000,000	0.00	1.03				
3	3.26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Media	17	1,460,234,000	1,460,234,000	1	42,000,000				1	42,000,000	5.88	2.88			
3	3.26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kegiatan	7	2,693,613,000	2,693,613,000					0	-	0.00	0.00				
3	3.26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1	698,698,600	698,698,600		18,000,000				0	18,000,000	0.00	2.58			
3	3.26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kemitraan	1	1,000,000,000	1,000,000,000						0	-	0.00	0.00			
															Rata-rata capaian kinerja (%)		1.47	1.36			
															Predikat Kinerja		Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)			
3	3.26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	PAD Sektor Ekonomi Kreatif	%	20	7,257,872,000	7,257,872,000	0	5,000,000	0	0		-	5,000,000	0.00	0.07	DISPAR	Indikator program dicapai di akhir tahun		
				Persentase Kenaikan Nilai Produksi Ekonomi Kreatif	%	25			0	0				-		0.00					
3	3.26	04	2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspres, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Prasarana	1	1,219,733,000	1,219,733,000		-				0	0	0.00	0.00				
3	3.26	04	2.01	01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Prasarana	1	1,219,733,000	1,219,733,000					0	0	0.00	0.00				
3	3.26	04	2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Sub Sektor	16	6,038,139,000	6,038,139,000	5,000,000					0	5,000,000	0.00	0.08				
3	3.26	04	2.02	04	Penyediaan Infrastruktur	Lokasi	1	162,000,000	162,000,000					0	0	0.00	0.00				
3	3.26	04	2.02	05	Pengembangan Sistem Pemasaran	kali	15	5,755,812,000	5,755,812,000		5,000,000				0	5,000,000	0.00	0.09			
3	3.26	04	2.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	orang	75	59,896,000	59,896,000						0	0	0.00	0.00			
3	3.26	04	2.02	08	Perlindungan Hasil Kreativitas	orang	50	60,431,000	60,431,000						0	0	0.00	0.00			
															Rata-rata capaian kinerja (%)		0.00	0.02			
															Predikat Kinerja		Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)			
3	3.26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA	Persentase SDM Pariwisata yang Mendapat Sertifikasi	%	30	2,483,763,500	2,483,763,500	0	0				-	0	0.00	0.00	DISPAR	Indikator program		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2021 (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET		
					K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.				
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	4	4.a	5			6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5 * 100%		12	13		
			Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	%	20	2,483,763,500	2,483,763,500									-	0	0.00	0.00		dicapai di akhir tahun		
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Tingkat dasar	Orang	1,000	2,483,763,500	2,483,763,500									0	-	0.00	0.00				
	3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan	Orang	800	956,812,000	956,812,000									0	-	0.00	0.00				
	3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata yang dilaksanakan	%	30	731,026,000	731,026,000									0	-	0.00	0.00				
	3.26.05.2.01.04	Sertifikasi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah tenaga kerja bidang pariwisata yang disertifikasi kompetensi	Orang	400	520,000,000	520,000,000									0	-	0.00	0.00				
	3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif yang difasilitasi	Fasilitas	15	199,925,500	199,925,500									0	-	0.00	0.00				
	3.26.05.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dimonitoring dan dievaluasi	Orang	3,000	76,000,000	76,000,000									0	-	0.00	0.00				
																		0.00	0.00				
																		Predikat Kinerja		Rendah (R)	Sangat Rendah (SR)		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						32,107,000,000		1,975,275,404		0	0		0		1,975,275,404			10.60	2.02				
																		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		10.60	2.02		
																		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)		

* Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

1. Komitmen Kepala Dinas Pariwisata dalam mencapai peningkatan kinerja angka kunjungan wisatawan

* Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

1. Beberapa program dan kegiatan seperti indeks kepuasan dan pembenahan sarana kepariwisataan masih dalam proses sehingga kinerja belum dapat diukur
2. Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan difokuskan

*Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

1. Kegiatan harus dapat terus dioptimalkan dalam upaya Pencapaian Target Kinerja Dinas Pariwisata

*Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :

1. Program kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan Dinas Pariwisata

Disusun,

Makassar, 2021

KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA MAKASSAR

Dievaluasi,

Makassar, 2021

KEPALA BAPPEDA
KOTA MAKASSARMuhammad Roem, S.STP, M.Si

Nip. 1983

(_____)

**RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PARIWISATA
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022**

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022			Lokasi	Prakiraan Maju Tahun 2023			Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Target Indikator	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Indikator	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	90%	12,131,679,900	APBD	Makassar	90%	12,701,069,824	APBD	Makassar	DISPAR	
		2. Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%				100%					
		3. Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90%				90%					
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	13	194,370,000	APBD	Makassar	13	114,495,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan	2	132,645,000	APBD	Makassar	2	42,250,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Dihasilkan	1	7,050,000	APBD	Makassar	1	8,800,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Dihasilkan	1	6,950,000	APBD	Makassar	1	8,700,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang Dihasilkan	1	6,700,000	APBD	Makassar	1	8,475,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang Dihasilkan	1	6,725,000	APBD	Makassar	1	8,470,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja yang Dihasilkan	3	20,580,000	APBD	Makassar	3	22,330,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang Dihasilkan	4	13,720,000	APBD	Makassar	4	15,470,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun	18	8,309,303,830	APBD	Makassar	18	9,552,478,624	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan dalam Setahun	61	7,582,583,830	APBD	Makassar	62	8,790,520,624	APBD	Makassar	DISPAR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022			Lokasi	Prakiraan Maju Tahun 2023			Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Target Indikator	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Indikator	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Tersedia	21	361,920,000	APBD	Makassar	22	316,560,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan yang Tersedia	6	108,000,000	APBD	Makassar	6	72,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Pelaksana Akuntansi yang Tersedia	2	-	APBD	Makassar	2	24,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Dihasilkan	1	-	APBD	Makassar	1	8,405,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dihasilkan	4	256,800,000	APBD	Makassar	4	333,420,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang Dihasilkan	1	-	APBD	Makassar	1	7,573,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Administrasi Barang Milik Daerah yang Tersedia	3	-	APBD	Makassar	3	33,690,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah yang Dihasilkan	1	-	APBD	Makassar	1	8,610,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Akrtivitas Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah yang Tersedia	1	-	APBD	Makassar	1	8,360,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang Dihasilkan	2	-	APBD	Makassar	2	16,720,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Adminitrasi Kepegawaian yang Tersedia	2	185,500,000	APBD	Makassar	3	295,200,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut yang Tersedia	100	128,000,000	APBD	Makassar	102	64,200,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang Tersedia	20	57,500,000	APBD	Makassar	22	231,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022			Lokasi	Prakiraan Maju Tahun 2023			Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Target Indikator	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Indikator	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Administrasi Umum yang Tersedia	8	1,148,230,400	APBD	Makassar	8	818,350,800	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia</i>	10	28,946,400	APBD	Makassar	12	24,173,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia</i>	10	118,766,000	APBD	Makassar	11	84,938,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia</i>	13	108,111,000	APBD	Makassar	14	43,639,800	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik/Kantor	<i>Jumlah Jenis Bahan Logistik/ Bahan yang Tersedia</i>	1	357,742,000	APBD	Makassar	1	27,560,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia</i>	2	62,425,000	APBD	Makassar	2	16,800,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedia</i>	6	12,240,000	APBD	Makassar	6	12,240,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Jenis Fasilitasi Kunjungan yang Tersedia</i>	2	60,000,000	APBD	Makassar	2	99,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang Tersedia</i>	24	400,000,000	APBD	Makassar	32	510,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang Tersedia	3	672,929,870	APBD	Makassar	3	595,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Diadakan</i>	1	-	APBD	Makassar	-	-	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan</i>	-	-	APBD	Makassar	3	350,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Mebel yang Diadakan</i>	10	200,000,000	APBD	Makassar	12	60,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan</i>	10	472,929,870	APBD	Makassar	10	185,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	2	877,693,800	APBD	Makassar	3	724,923,600	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Jasa Surat Menyurat yang Tersedia</i>	22	641,817,600	APBD	Makassar	23	457,856,400	APBD	Makassar	DISPAR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022			Lokasi	Prakiraan Maju Tahun 2023			Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Target Indikator	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Indikator	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia	3	235,876,200	APBD	Makassar	3	219,067,200	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	2	-	APBD	Makassar	2	48,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Tersedia	5	743,652,000	APBD	Makassar		566,931,800	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1	40,630,000	APBD	Makassar	1	28,336,800	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	25	217,732,000	APBD	Makassar	28	299,975,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	11,840,000	APBD	Makassar	35	17,600,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62	88,450,000	APBD	Makassar	72	61,020,000	APBD	Makassar	DISPAR	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1	385,000,000	APBD	Makassar	1	160,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1. Tingkat Hunian Akomodasi	43%	28,065,042,200	APBD	Makassar	48%	4,650,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
		2. Jumlah Destinasi yang Berstandar Nasional	1 Destinasi				1 Destinasi					
02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yan Dibenahi	100	5,302,550,000	APBD	Makassar	100	300,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata (Lorong Wisata) yang dikembangkan	100	5,302,550,000	APBD	Makassar	100	300,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang Dibenahi	1	950,709,000	APBD	Makassar	1	400,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota Makassar yang Dilaksanakan	12	950,709,000	DAK-Non Fisik	Makassar	12	400,000,000	DAK-Non Fisik	Makassar	DISPAR	
02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi yang Dibenahi	1	21,446,029,200	APBD	Makassar	1	3,050,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah masterplan destinasi pariwisata yang dibuat	3	1,033,200,000	APBD	Makassar	2	500,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi yang dikembangkan	1	17,781,664,000	APBD	Makassar	1	800,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022			Lokasi	Prakiraan Maju Tahun 2023			Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Target Indikator	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Indikator	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi yang direhab dan dipelihara	1	2,014,365,200	APBD	Makassar	1	1,000,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi yang dimonitoring dan dievaluasi	30	188,000,000	APBD	Makassar	30	200,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang diberdayakan	15	428,800,000	APBD	Makassar	20	550,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TDUP yang Difasilitasi	200	365,754,000	APBD	Makassar	200	900,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah TDUP yang difasilitasi	200	365,754,000	APBD	Makassar	200	300,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Usaha yang dibina dan diawasi	200	-	APBD	Makassar	200	400,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
02.2.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	jumlah usaha yang difasilitasi	50	-	APBD	Makassar	50	200,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1. Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kota Makassar	5%	7,066,567,000	APBD	Makassar	6.50%	7,965,930,176	APBD	Makassar	DISPAR	
		2. Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Perkebangaan	3%				3.50%					
03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Perkebangaan	30,844	7,066,567,000	APBD	Makassar	31,923	7,965,930,176	APBD	Makassar	DISPAR	
03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi melalui media cetak elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri yang mendapat penguatan	28	2,109,266,000	APBD	Makassar	20	2,651,233,140	APBD	Makassar	DISPAR	
03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri Pariwisata Kota Makassar yang di fasilitasi	17	3,361,077,000	APBD	Makassar	10	3,259,271,730	APBD	Makassar	DISPAR	
03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi Baik dalam dan Laur Negeri yang bersangkutan	3	596,224,000	APBD	Makassar	3	845,425,306	APBD	Makassar	DISPAR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022			Lokasi	Prakiraan Maju Tahun 2023			Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Target Indikator	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Indikator	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kerja sama dan kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri yang dilaksanakan	1	1,000,000,000	APBD	Makassar	1	1,210,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1. PAD Sektor Ekonomi Kreatif 2. Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Mendapatkan HAKI	15.10%	10,748,851,000	APBD	Makassar	15.17%	7,146,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
		75	100									
04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi nsan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Penyediaan Prasarana sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif	1	530,000,000	APBD	Makassar	1	850,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah prasarana Kota Kreatif	1	530,000,000	APBD	Makassar	1	850,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
	PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	4	10,218,851,000	APBD	Makassar	10	6,296,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
	Pengembangan Riset	Jumlah Dokumen Riset yang di hasilkan	-	-	APBD	Makassar	153	306,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Anak yang diBinaan pendidikan	50	1,354,050,000	APBD	Makassar	65	65,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pelaku yang difasilitasi pembiayaan dan pendanaan	-	-	APBD	Makassar	50	100,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah infrasktruktur yang tersedia	1	759,069,000	APBD	Makassar	8	225,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Event yang di fasilitasi/jumlah even yang dilaksanakan	54	7,591,482,000	APBD	Makassar	16	4,800,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
	Pemberian Insentif	Jumlah Pelaku yang menerima Insentif	-	-	APBD	Makassar	10	150,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Pelaku Yang di Fasilitasi	500	514,250,000	APBD	Makassar	100	50,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Pelaku Yang di Fasilitasi	-	-	APBD	Makassar	100	50,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen rencana aksi pengembangan ekraf	-	-	APBD	Makassar	1	300,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dimonitoring/ evaluasi	-	-	APBD	Makassar	4	250,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022			Lokasi	Prakiraan Maju Tahun 2023			Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Target Indikator	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Indikator	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1. Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Pariwisata 2. Persentase SDM Pariwisata yang Mendapatkan Sertifikasi 3. Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	750 Orang 6.4% 10%	3,198,325,900	APBD	Makassar	800 Orang 6.4% 10%	4,380,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Tersedia	7	3,198,325,900	APBD	Makassar	6	3,830,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Tenaga Kerja yang dikembangkan kompetensinya. (Orang)	750	1,115,631,000	APBD	Makassar	800	850,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Keg)	2	270,256,500	APBD	Makassar	3	830,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Meningkatnya Presentase Tingkat Dasar SDM Kepariwisata (Orang)	1000	595,568,000	APBD	Makassar	1000	550,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti uji kompetensi. (Orang)	450	660,000,000	APBD	Makassar	500	650,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah jenis fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif yang diberikan. (Keg)	24	270,870,400	APBD	Makassar	30	600,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah jenis fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif yang diberikan (fasilitasi)	-	-	APBD	Makassar	-	-	APBD	Makassar	DISPAR	
05.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang di Evaluasi (Orang)	3500	286,000,000	APBD	Makassar	3600	350,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022			Lokasi	Prakiraan Maju Tahun 2023			Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			Target Indikator	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Indikator	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang tersedia	1	-	APBD	Makassar	2	550,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif. (Orang)	-	-	APBD	Makassar	350	250,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
05.2.02.02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah jenis fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha yang di berikan. (Keg)	-	-	APBD	Makassar	1	300,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
TOTAL				61,210,466,000				36,843,000,000				

Makassar, April 2021

Plh. Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar

Muhammad Roem, S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 19831110 200212 1 001

968,068,200
450,000,000
518,068,200

(1,152,687,437)
2,427,287,100
(2,407,960,000)
(2,746,546,500)
(1,042,284,500)
(4,922,191,337)
968,068,200
(3,954,123,137)
(3,806,448,100)
(8,728,639,437)